

## PENDAMPINGAN PEMAHAMAN PERJALANAN DINAS UNTUK PEGAWAI NEGERI DI KANTOR DPRD KOTA YOGYAKARTA

Andhika Raphael Sutedja<sup>1</sup>, Rochmad Bayu Utomo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta  
*email: andhikasutedja@gmail.com*

### Abstrak

Perjalanan dinas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam memenuhi tugas kedinasan yang diberikan oleh instansi pemerintah, pegawai negeri sipil di kantor DPRD Kota Yogyakarta sudah cukup baik dalam memahami konsep perjalanan dinas namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekeliruan. Untuk itu diadakanlah kegiatan pendampingan ini untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam perjalanan dinas bagi pegawai negeri di Kantor DPRD Kota Yogyakarta. Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap lima pegawai negeri yang telah mendapatkan pendampingan perjalanan dinas. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi para pegawai, seperti membantu mereka memahami peraturan dan tata cara yang harus dilakukan selama perjalanan dinas, membuat mereka merasa lebih siap dan terorganisir saat melakukan perjalanan dinas, serta memberikan rasa aman dan tenang selama perjalanan. Implikasi dari hasil temuan ini adalah bahwa pendampingan pemahaman perjalanan dinas dapat meningkatkan kinerja pegawai dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan selama perjalanan dinas. Oleh karena itu, kantor DPRD Kota Yogyakarta sebaiknya mempertimbangkan untuk memberikan pendampingan perjalanan dinas sebagai bagian dari program pelatihan dan pengembangan pegawai.

**Kata kunci:** Pendampingan Perjalanan Dinas, Pemahaman, Pegawai Negeri, Kinerja

### Abstract

Official travel is an activity carried out by civil servants in fulfilling official duties given by government agencies, civil servants at the Yogyakarta City DPRD office are quite good at understanding the concept of official travel but in practice there are still mistakes. For this reason, this mentoring activity was held to minimize mistakes that occur during official travel for civil servants at the Yogyakarta City DPRD Office. This activity used a qualitative approach using in-depth interview techniques with five civil servants who had received official travel assistance. The results of the activity show that the assistance provides significant benefits for employees, such as helping them understand the rules and procedures that must be carried out during business trips, making them feel more prepared and organized when traveling on business trips, and providing a sense of security and calm during travels. These findings imply that assistance with understanding business trips can improve employee performance and reduce the risk of errors occurring during business trips. Therefore, the Yogyakarta City DPRD office should consider providing business travel assistance as part of an employee training and development program.

**Keywords:** Official Travel Assistance, Understanding, Civil Servants, Performance.

### PENDAHULUAN

Perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang PNS dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh instansi atau lembaga pemerintah yang bersangkutan. Perjalanan dinas ini dilakukan dengan tujuan untuk menghadiri acara, pertemuan, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas kedinasan yang harus dilaksanakan di luar kantor atau wilayah kerja sehari-hari (Setyaningrum & Jeremi, 2020). Perjalanan dinas PNS harus dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti peraturan perjalanan dinas atau peraturan menteri terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus membuat permohonan perjalanan dinas terlebih dahulu, yang nantinya akan mendapatkan persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang.

Selama perjalanan dinas, PNS diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan mematuhi aturan yang berlaku, serta memastikan keamanan dan kenyamanan selama perjalanan. Setelah selesai melakukan perjalanan dinas, PNS diharuskan untuk menyusun laporan perjalanan dinas yang berisi

rencian kegiatan yang dilakukan, anggaran yang telah digunakan, serta hasil dan evaluasi dari perjalanan dinas tersebut. Perjalanan dinas PNS juga harus transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas. Oleh karena itu, setiap biaya yang dikeluarkan harus dijustifikasi secara lengkap dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran perjalanan dinas tidak menimbulkan penyimpangan atau kecurangan (Yoga & Veritawati, 2021).

Pendampingan perjalanan dinas adalah suatu layanan atau dukungan yang diberikan kepada pegawai atau karyawan suatu instansi atau perusahaan dalam rangka memahami dan menjalankan tugas perjalanan dinas dengan efektif dan efisien. Pendampingan ini bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki pengalaman atau keahlian dalam bidang perjalanan dinas, atau oleh pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur dan memantau pelaksanaan perjalanan dinas, seperti staf administrasi atau manajemen (Setiawan, Jati & Fatmasari, 2018).

Pendampingan perjalanan dinas dapat meliputi beberapa hal, seperti memberikan informasi dan panduan mengenai persiapan perjalanan, termasuk persiapan dokumen dan pengajuan permohonan perjalanan dinas, memantau pelaksanaan perjalanan dinas, serta membantu dalam penyelesaian administrasi terkait dengan perjalanan dinas, termasuk laporan perjalanan dan pengelolaan anggaran perjalanan dinas.

Tujuan dari pendampingan perjalanan dinas adalah untuk memastikan bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dengan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, serta untuk memastikan bahwa pegawai atau karyawan mampu menjalankan tugas perjalanan dinas dengan efektif dan efisien. Selain itu, pendampingan perjalanan dinas juga dapat membantu dalam pencegahan terjadinya penyimpangan dan kecurangan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas (Lumempouw, Nangoi, & Kalangi, 2021).

Kegiatan yang diusulkan akan mengkaji mengenai pendampingan pemahaman perjalanan dinas atau perdin bagi pegawai negeri di Kantor DPRD Kota Yogyakarta. Kegiatan pendampingan ini sangat relevan mengingat perjalanan dinas atau perdin adalah suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh pegawai negeri dan merupakan tanggung jawab instansi yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Namun, masih terdapat kasus penyelewengan dalam biaya perjalanan dinas yang terjadi di beberapa instansi pemerintah, seperti yang dikaji dalam penelitian Lumempouw et al. (2021) mengenai pencegahan dan pendeteksian fraud biaya perjalanan dinas pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pada sisi lain, kegiatan mengenai pendampingan juga sudah banyak dilakukan pada berbagai sektor, seperti pada pelaksanaan pendampingan akreditasi puskesmas oleh Setiawan et al. (2018), penyuluhan hukum dan pendampingan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja oleh Adillah et al. (2021), serta pengembangan sistem informasi manajemen surat perintah perjalanan dinas oleh Rahmayanti (2021) dan sistem informasi perjalanan dinas Kementerian Sosial oleh Yoga dan Veritawati (2021).

Meskipun begitu, masih terdapat kekurangan kegiatan pengabdian masyarakat yang mengkaji mengenai pendampingan pemahaman perjalanan dinas atau perdin secara khusus bagi pegawai negeri. Oleh karena itu, kegiatan ini akan berfokus pada aspek pendampingan dan pemahaman dalam melaksanakan perjalanan dinas bagi pegawai negeri di Kantor DPRD Kota Yogyakarta, yang dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran perjalanan dinas atau perdin pada instansi pemerintah.

## METODE

Kegiatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan metode studi kasus, observasi, wawancara, atau focus group discussion (FGD) untuk mengumpulkan data (Ramdhan, 2021). Peneliti dapat melakukan observasi dan wawancara terhadap pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas untuk memahami pengalaman dan pandangan mereka terkait dengan pendampingan pemahaman perjalanan dinas yang diberikan. Informan dalam metode kualitatif adalah orang yang memberikan informasi terkait fenomena yang diteliti. Informan dalam kegiatan ini adalah pegawai negeri di Kantor DPRD Kota Yogyakarta yang telah mengalami pendampingan pemahaman perjalanan dinas.

Selain itu, peneliti juga dapat melakukan FGD dengan beberapa pegawai untuk memahami persepsi mereka terkait dengan proses pendampingan perjalanan dinas. Selain itu, peneliti juga dapat

menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen terkait, seperti surat tugas, laporan perjalanan dinas, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan pendampingan pemahaman perjalanan dinas. Dalam mengumpulkan data, peneliti perlu memperhatikan etika penelitian dan memastikan bahwa responden telah memberikan persetujuan untuk diikutsertakan dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga perlu melakukan analisis data yang tepat untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjalanan dinas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam memenuhi tugas kedinasan yang diberikan oleh instansi pemerintah, pegawai negeri sipil di kantor DPRD Kota Yogyakarta sudah cukup baik dalam memahami konsep peraturan dan tata cara terkait perjalanan dinas namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kesalahan terkait pemahaman tersebut, untuk itu dilakukan pendampingan pemahaman perjalanan dinas atau perdin untuk Pegawai Negeri di Kantor DPRD Kota Yogyakarta. Hal ini merupakan proses pendampingan atau bimbingan yang diberikan kepada pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi semua persyaratan dan prosedur yang terkait dengan perjalanan dinas tersebut. Pendampingan ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan atau pelanggaran yang mungkin terjadi selama perjalanan dinas dan untuk memastikan bahwa perjalanan dinas dilakukan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini dilakukan dalam kurun waktu 31 hari dan dimulai pada tanggal 13 Februari 2023 sampai tanggal 15 Maret 2023.



Gambar 1 Proses Wawancara di DPRD Yogyakarta

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa pendampingan yang diberikan oleh pihak kantor sangat membantu responden dalam mempersiapkan dan melakukan perjalanan dinas dengan lebih baik. Responden merasa lebih siap dan terorganisir karena telah memperoleh panduan dan penjelasan mengenai peraturan dan tata cara yang harus dilakukan saat melakukan perjalanan dinas. Responden menyatakan "Saya merasa lebih siap dan terorganisir ketika melakukan perjalanan dinas setelah mendapatkan pendampingan dari pihak kantor." Hal ini mengindikasikan bahwa pihak kantor telah memberikan dukungan yang memadai untuk memastikan bahwa perjalanan dinas dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan ungkapan responden yakni "Pendampingan tersebut sangat membantu saya dalam memahami peraturan dan tata cara yang harus dilakukan saat melakukan perjalanan dinas."

Selain itu, responden juga merasa lebih aman dan tenang karena telah diberikan pemahaman yang cukup oleh pihak kantor. "Saya merasa lebih aman dan tenang ketika melakukan perjalanan dinas karena saya telah diberikan pemahaman yang cukup oleh pihak kantor." Ungkap responden saat diwawancarai. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan oleh kantor tidak hanya membantu dalam hal persiapan dan pelaksanaan perjalanan dinas, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi responden selama melakukan perjalanan dinas.

Dengan demikian, pendampingan yang diberikan oleh kantor dapat dianggap sebagai sebuah dukungan yang penting bagi karyawan yang melakukan perjalanan dinas. Pendampingan tersebut dapat membantu karyawan untuk melakukan perjalanan dinas dengan lebih baik, lebih aman, dan lebih nyaman.

Proses pendampingan pemahaman perjalanan dinas dapat mencakup beberapa tahap, di antaranya:

1. Penjelasan tentang ketentuan perjalanan dinas  
Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas perlu diberikan penjelasan tentang ketentuan perjalanan dinas, termasuk tujuan perjalanan dinas, jenis transportasi yang digunakan, lama perjalanan dinas, jadwal keberangkatan dan kepulangan, serta biaya yang akan ditanggung oleh instansi.
2. Penjelasan tentang prosedur perjalanan dinas  
Pegawai perlu diberikan penjelasan tentang prosedur perjalanan dinas, termasuk prosedur pengajuan permohonan perjalanan dinas, prosedur pembuatan surat tugas, prosedur pengajuan uang muka, dan prosedur pelaporan hasil perjalanan dinas.
3. Verifikasi dokumen persyaratan perjalanan dinas  
Pegawai perlu memenuhi beberapa persyaratan dokumen untuk melakukan perjalanan dinas, seperti surat tugas, paspor, visa (jika diperlukan), tiket transportasi, dan bukti penginapan. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen persyaratan tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pendampingan selama perjalanan dinas  
Pendampingan juga dapat dilakukan selama perjalanan dinas, misalnya memberikan informasi tentang tempat tujuan, membantu dalam hal keamanan dan kesehatan, serta memberikan dukungan jika terjadi kendala selama perjalanan dinas.

Dengan melakukan pendampingan pemahaman perjalanan dinas ini, diharapkan pegawai dapat melakukan perjalanan dinas dengan efektif dan efisien serta meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kesalahan selama perjalanan dinas. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas dan hasil dari perjalanan dinas yang dilakukan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pendampingan pemahaman perjalanan dinas memiliki manfaat bagi pegawai negeri di Kantor DPRD Kota Yogyakarta dalam melakukan perjalanan dinas dengan lebih siap dan terorganisir. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa responden merasa lebih siap dan terorganisir dalam melakukan perjalanan dinas setelah mendapatkan pendampingan dari pihak kantor. Mereka juga merasa lebih aman dan tenang karena telah diberikan pemahaman yang cukup oleh pihak kantor mengenai peraturan dan tata cara yang harus dilakukan saat melakukan perjalanan dinas.

Pendampingan pemahaman perjalanan dinas menjadi semakin penting dalam konteks pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Peraturan dan tata cara dalam melakukan perjalanan dinas menjadi semakin ketat dan rumit, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam agar tidak terjadi pelanggaran dan penyebaran virus yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, pendampingan dapat menjadi solusi yang efektif dalam memastikan keselamatan dan keamanan pegawai dalam melakukan perjalanan dinas.

Dalam konteks teori dan penelitian sebelumnya, hasil kegiatan ini konsisten dengan temuan yang menunjukkan bahwa pendampingan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam melakukan tugasnya. Hasil kegiatan sebelumnya yang dilakukan (Setyaningrum & Jeremi, 2020) menunjukkan bahwa pendampingan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas kerja, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kepuasan pegawai. Hasil penelitian ini menambah bukti empiris bahwa pendampingan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam berbagai konteks, termasuk dalam hal perjalanan dinas.

Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pendampingan ini hanya dilakukan pada pegawai negeri di Kantor DPRD Kota Yogyakarta. Sehingga, hasil kegiatan ini tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk populasi pegawai negeri di tempat lain. Kedua, kegiatan ini hanya menggunakan metode wawancara sebagai sumber informasi, sehingga terdapat kemungkinan adanya bias dari responden. Oleh karena itu, kegiatan selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan metode observasi dan dokumentasi lain sebagai acuan sumber informasi yang dibutuhkan.

Selanjutnya, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan pemahaman perjalanan dinas memberikan manfaat bagi pegawai negeri di Kantor DPRD Kota Yogyakarta dalam melakukan perjalanan dinas dengan lebih siap dan terorganisir. Hasil ini konsisten dengan kegiatan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendampingan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam melakukan tugasnya. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya kebutuhan akan panduan yang jelas dan bimbingan

ketika melakukan perjalanan dinas, terutama untuk pegawai yang masih baru dalam bekerja di Kantor DPRD Kota Yogyakarta. Melalui pendampingan, pegawai dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi saat melakukan perjalanan dinas, sehingga dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Selain itu, hasil kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendampingan pemahaman perjalanan dinas membuat pegawai merasa lebih aman dan tenang saat melakukan perjalanan dinas. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya perasaan khawatir atau tidak yakin dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas, terutama jika harus melakukan perjalanan ke daerah yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Dengan adanya pendampingan, pegawai dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai rute perjalanan, akomodasi, dan persyaratan keamanan, sehingga dapat mengurangi rasa khawatir dan kebingungan saat melakukan perjalanan dinas.

Implikasi hasil temuan ini bagi praktisi adalah pentingnya menyediakan pendampingan pemahaman perjalanan dinas bagi pegawai yang melakukan tugas perjalanan dinas. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan panduan dan pelatihan mengenai persyaratan dan prosedur perjalanan dinas, serta melalui bimbingan langsung saat melakukan perjalanan dinas. Dalam hal ini, Kantor DPRD Kota Yogyakarta dapat menyediakan pelatihan dan bimbingan mengenai perjalanan dinas bagi pegawai, sehingga dapat memastikan bahwa pegawai siap dan terorganisir saat melakukan tugas perjalanan dinas. Dalam hal ini, Kantor DPRD Kota Yogyakarta dapat melibatkan pihak-pihak yang berkaitan seperti pihak keamanan, kesehatan, dan transportasi dalam memberikan pemahaman yang cukup mengenai peraturan dan tata cara perjalanan dinas. Dalam jangka panjang, program pendampingan ini dapat meningkatkan kinerja pegawai, mengurangi risiko pelanggaran, dan meningkatkan keamanan dan kesehatan pegawai dalam melakukan perjalanan dinas.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memiliki implikasi bagi kebijakan dan praktik di Kantor DPRD Kota Yogyakarta. Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan pemahaman perjalanan dinas dapat meningkatkan kesiapan, organisasi, dan keamanan pegawai dalam melakukan perjalanan dinas. Oleh karena itu, Kantor DPRD Kota Yogyakarta dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan program pendampingan seperti memberikan pelatihan atau seminar kepada pegawai tentang peraturan dan tata cara perjalanan dinas, serta menyediakan panduan perjalanan dinas yang jelas dan mudah dipahami. Dalam jangka panjang, tindakan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Kantor DPRD Kota Yogyakarta.

Namun, ada beberapa batasan dalam kegiatan ini yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kegiatan ini dilakukan dengan sampel yang terbatas dan mewakili hanya pegawai di Kantor DPRD Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, hasil ini tidak dapat diterapkan secara langsung pada populasi yang lebih luas atau konteks organisasi yang berbeda. Kedua, penelitian ini hanya melibatkan wawancara dan tidak menggunakan metode lain seperti observasi atau kuesioner. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa hasil wawancara tidak merepresentasikan perspektif yang komprehensif dari semua pegawai

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan yakni setelah mengikuti kegiatan pendampingan pemahaman perjalanan dinas, pegawai negeri sipil di Kantor DPRD Kota Yogyakarta menjadi lebih siap dan terorganisir dalam melakukan perjalanan dinas. Hasil ini konsisten dengan kegiatan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendampingan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam melakukan tugasnya. Implikasi hasil temuan ini termasuk rekomendasi untuk meningkatkan program pendampingan di Kantor DPRD Kota Yogyakarta, serta pembatasan dari penelitian ini, seperti keterbatasan sampel dan metodologi. Selanjutnya, penelitian dapat diperluas dengan melibatkan sampel yang lebih luas dan menggunakan metode yang berbeda untuk memperkuat hasil penelitian.

## **SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan segala keterbatasan yang ada, diharapkan penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan melibatkan sampel yang lebih luas dan menggunakan metode yang berbeda untuk memperkuat hasil penelitian.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada pihak 1) Kantor DPRD Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kerjasamanya dalam melakukan pengabdian masyarakat ini, 2) semua pegawai negeri yang telah bersedia meluangkan waktu dan telah bekerja sama dengan baik untuk mengikuti pendampingan yang saya berikan, 3) Dosen Pembimbing yang telah membantu dalam penyelesaian kegiatan ini, dan semua pihak hingga artikel dapat diterbitkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adillah, S. U., Purnawan, A., & Istina, S. R. D. (2021). Penyuluhan Hukum Dan Pendampingan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Kelompok Tani "Sumber Rejo" Desa Tuwang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(01), 1-9.
- Lumempouw, E. G., Nangoi, G. B., & Kalangi, L. (2021). Analisis Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip) Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud Biaya Perjalanan Dinas (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(2), 252-263.
- Ningrum, A. G. W., & Ambarwati, M. F. (2015). Optimalisasi Administrasi Perjalanan Dinas. *Jurnal Administrasi Dan Kesekretarisan*, 7(1), 78-90.
- Rahmayanti, A. (2021). Pengembangan Purwarupa Sistem Informasi Manajemen Surat Perintah Perjalanan Dinas Dengan Metode User Centered Design (Studi Kasus: Fti Universitas Islam Indonesia).
- Ramdhan, M. (2021). Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Setiawan, H. T., Jati, S. P., & Fatmasari, E. Y. (2018). Analisis Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Puskesmas Pada Kelompok Kerja Administrasi Dan Manajemen Di Kabupaten Pemalang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 6(5), 75-85.
- Setyaningrum, D., & Jeremi, I. (2020). Analisis Pola Penyelewengan Beban Perjalanan Dinas Pada Kementerian Di Indonesia Tahun 2015-2017. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(4), 255-272.
- Yoga, R. D., & Veritawati, I. (2021). Sistem Informasi Perjalanan Dinas Kementerian Sosial. *JTKSI (Jurnal Teknologi Komputer Dan Sistem Informasi)*, 4(2), 82-92.